

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI
(Studi Di Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2009-2013)**

Oleh:

Syukria Dewi

Pembimbing: Restu Agusti dan Rahmiati Idrus

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : dewisyukria@yahoo.com

*Regional Financial Performance Analysis to Support Implementation of Regional
Autonomy Government of Bukittinggi
(Studies in Bukittinggi Fiscal Year 2009 – 2013)*

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of Bukittinggi government in supporting the implementation of regional autonomy. This study used a descriptive study with a qualitative approach. The results showed the level of independence of the City of Dublin is very low and does not yet support the implementation of regional autonomy with an average ratio of 10.44. The effectiveness of its budget on average 96.35 which is classified as not effective. Budget efficiency level of Bukittinggi was on average 0.66 were considered to be very efficient. The level of dependence of Bukittinggi is high with an average ratio of 89.42. Local revenue growth of Bukittinggi was on average 11.19 belonging increases and tends positive. Overall bukittinggi City local government is not independent and does not yet support the implementation of regional autonomy because it still has the instructive relationship pattern is a pattern of relations in which the role of the central government is more dominant than the role of the state itself.

Keyword: decentralization, local independence, and regional growth

PENDAHULUAN

Akuntansi keuangan (pemerintahan) daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi di tahun 1998. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi

berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Semangat reformasi di berbagai bidang, mengharuskan pemerintahan menanggapi tuntutan tersebut yang salah satu tuntutan dimaksud adalah pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang diatas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.(Abdul Halim,- Muhammad Syam Kusufi ,2011).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dimulai sejak tahun 2001 menunjukkan fakta bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah dari tahun ke tahun terus meningkat. Alokasi dana dimaksud diharapkan dapat meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan termasuk penyediaan layanan public yang memadai. Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya tersebut adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang tersedia untuk menghasilkan *output/* pelayanan publik yang optimal. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Se-jalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Josef Riwu Kaho ,2012)

Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan kebijakan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah agar dapat membiayai keperluan dan belanja di daerah masing – masing. Dari data anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) nasional, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan tugas otonomi daerahnya dengan baik, salah satunya terlihat dari terus meningkatnya pendapatan asli daerah nasional dan pendapatan daerah nasional dari tahun ke tahun.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban oleh kepala daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). (Josef Riwu Kaho ,2012)

Untuk mengukur kinerja keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, penelitian ini menggunakan rasio kemandirian daerah, rasio efektifitas anggaran, rasio efisiensi anggaran, rasio ketergantungan daerah dan rasio pertumbuhan anggaran. Rasio kemandirian daerah merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaiknya menurut Halim, (2002).

Dan Rasio efektivitas menggambarkan perbandingan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Suprpto, 2008). Apabila realisasi penerimaan pendapatan asli daerah semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran pendapatan asli daerah (target PAD), maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan PAD semakin efektif. Rasio efisiensi anggaran menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim, 2004:287). Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien, apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%.

Rasio ketergantungan menggambarkan perbandingan antara pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi

rasio ketergantungan maka semakin buruk pemerintah daerah karena tidak adanya dana dari penghasilan daerah sendiri yang seharusnya dapat membiayai kebutuhan daerahnya sendiri (Suprpto, 2008). Dan rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat (Suprpto,2008).

Pada pemerintahan Kota Bukittinggi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun relatif meningkat, tetapi transfer dari pusat juga tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan kota Bukittinggi masih relatif kuat terhadap pusat. Kota Bukittinggi merupakan salah satu Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan berbagai potensi daerah yang cukup besar dalam peningkatan keuangan daerah di masa datang. Adanya pelaksanaan desentralisasi dalam era otonomi daerah merupakan suatu peluang yang dapat dimanfaatkan dengan diikuti oleh penciptaan dan peningkatan efektivitas sumber-sumber penerimaan daerah dan perencanaan ekonomi makro daerah atau keuangan daerah yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :(1)Bagaimanakah tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bukittinggi selama tahun anggaran 2009-2013?,(2)Bagaimana tingkat efektifitas anggaran di Kota Bukittinggi selama tahun anggaran

2009-2013?, 3) Bagaimana tingkat efesiensi anggaran di Kota Bukittinggi selama tahun anggaran 2009-2013?, (4) Bagaimana tingkat ketergantungan keuangan daerah kota Bukittinggi terhadap pihak eksternal tahun anggaran 2009-2013?, (5) Bagaimana pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi selama tahun anggaran 2009 – 2013?

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bukittinggi dalam rangka penerapan otonomi daerah selama tahun anggaran 2009-2013, (2) Menganalisis tingkat efektivitas anggaran di Kota Bukittinggi selama tahun anggaran 2009-2013, (3) Menganalisis tingkat efesiensi anggaran di Kota Bukittinggi selama tahun anggaran 2009-2013, (4) Menganalisis tingkat ketergantungan keuangan daerah kota Bukittinggi terhadap pihak eksternal tahun anggaran 2009-2013, (5) Menganalisis tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi selama tahun anggaran 2009 – 2013

Penulis berharap, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya: (1) Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya mengenai pengukuran kinerja anggaran daerah. (2) Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja pengelolaan anggaran daerah (3) Bagi Pemerintah daerah, diharapkan dapat memberi masukan baik bagi pemerintah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan

peningkatan PAD, pengendalian, dan evaluasi dari APBN dan APBD, serta UU dan PP yang menyertainya

TINJAUAN PUSTAKA

1. Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Menurut Mardiasmo (2011), tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah.

Otonomi daerah sangat berkaitan dengan desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan perundangundangan.

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mardiasmo (2011:59)

menyatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Oleh karena itu, peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi merupakan informasi penting untuk membuat kebijakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan/kemandirian daerah (Addina Marizka, 2009)

2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi (Dedi Nordiawan, 2006)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas tiga komponen yaitu:

1. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana perimbangan;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja operasi
- b. Belanja modal
- c. Belanja tidak terduga

3. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas:

a. Penerimaan daerah yang terdiri atas Sisa laba perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), Pencairan dana, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, Penerimaan piutang daerah, dan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja (*performance*) dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari tolok ukur keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses, atau suatu unit organisasi.

Dalam penelitian ini, istilah yang penulis maksudkan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban oleh kepala daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah (Dedi Nordiawan, 2006).

a. Rasio Tingkat Kemandirian Daerah

Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan kemampuan masyarakat dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah, mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapat Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan. (Halim, 2004:284)

$$\text{Tingkat Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Berikut tabel tingkat kemandirian daerah :

Rasio Kemandirian	Tingkat Kemandirian
0%-25%	Sangat Rendah
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

Sumber : Suprpto, 2008:59

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan

demikian pula sebaiknya, semakin rendah rasio kemandirian daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin tinggi.

b. Rasio efektifitas anggaran

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana, dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai dan tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya. (Yoserizal, 2011:1 dalam Siagian, 2001:24).

Rasio efektivitas menggambarkan perbandingan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Suprpto, 2008).

Rasio Efektivitas =
$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Total Penerimaan PAD yang dianggarkan}} \times 100\%$$

Berikut tabel tingkat efektifitas anggaran daerah :

% Rasio Efektifitas	Tingkat efektifitas
>100%	Efektif
=100%	Berimbang
<100%	Tidak efektif

Sumber : Halim (2011:129)

Apabila realisasi penerimaan pendapatan asli daerah semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran pendapatan asli daerah (target PAD), maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan PAD semakin efektif. Sedangkan apabila realisasi penerimaan pendapatan asli daerah semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target PAD), maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan PAD kurang efektif.

c. Rasio efesiensi anggaran

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. (Halim, 2004:287)

Formula yang digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi anggaran adalah :

Rasio Efisiensi =
$$\frac{\text{Biaya yg dikeluarkan memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

% Rasio	Tingkat Efisien
---------	-----------------

Efisiensi	
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Suprpto (2008:75)

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien, apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah semakin baik. Dan sebaliknya, semakin besar rasio efisiensi mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah semakin buruk.

d. Rasio ketergantungan

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain- lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan tersebut bersal dari transfer pemerintah pusat , transfer pemerintah pusat lainnya dan transfer pemerintah profinsi. Dana – dana inilah yang membantu daerah dalam membiayai segala kebutuhan daerahnya. Adannya bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak sedikit daerah yang bergantung pada dana bantuan tersebut. Sehingga pemerintah daerah tidak mandiri dalam membiayai pelaksanaan otonomi dan membiayai kebutuhan daerahnya.

Rasio Ketergantungan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah menggunakan dana-dana yang diberikan pemerintah.

Rasio Ketergantungan =

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

.Berikut tabel tingkat ketergantungan daerah.

Rasio Ketergantungan	Tingkat ketergantungan
0%-25%	Sangat rendah
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

Sumber : Suprpto, 2008:60

Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin buruk pemerintah daerah karena tidak adanya dana dari penghasilan daerah sendiri yang seharusnya dapat membiayai kebutuhan daerahnya sendiri

e. Rasio pertumbuhan

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Pemda untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah.

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai. Rasio Pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Menurut Suprpto (2008:92) Formula untuk menghitung rasio

pertumbuhan pendapatan asli daerah adalah :

$$\text{Pertumbuhan PAD}_t = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}}$$

Jika pertumbuhan pendapatan asli daerah tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat maka terjadi peningkatan kinerja pendapatan asli daerah. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk survey data sekunder yang dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi (DPKAD). Jenis data yang penulis kumpulkan dan di-gunakan dalam melakukan penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi periode tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :dengan menggunakan teknik dokumentasi, mendapatkan data atau informasi dari dokumen-dokumen yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi (DPKAD).

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif *case study* (studi kasus), yaitu metode penganalisaan data dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian mengklasifikasikan, menganalisis, dan selanjutnya menginterpretasikannya sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio kemandirian daerah
Hasil perhitungan rasio kemandirian daerah kota bukitinggi tahun - anggaran 2009-2013 ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Tingkat Kemandirian Daerah Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	% TKD	Kemandirian
2009	38.891.935.383,56	339.931.743.992,56	11,44%	Sangat Rendah
2010	33.847.174.752,21	338.421.473.678,21	10,00%	Sangat Rendah
2011	42.223.418.002,00	401.417.194.463,00	10,52%	Sangat Rendah
2012	45.076.555.841,00	461.396.488.849,00	9,77%	Sangat Rendah
2013	55.203.591.605,00	527.475.062.408,00	10,47%	Sangat Rendah

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.1 mengenai tingkat kemandirian keuangan pemerintah

daerah Kota Bukittinggi berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 10,44%. Hal ini menggambarkan

bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sangat rendah, artinya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terhadap pihak eksternal dinilai masih tinggi.

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat kemandirian daerah Kota Bukittinggi dalam rangka mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan sosial kemasyarakatan secara keseluruhan tergolong masih sangat rendah dan belum mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena rasio kemandirian daerah Kota Bukittinggi hanya berada di kisaran

9% sampai 11%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kota Bukittinggi memiliki pola hubungan yang instruktif, yaitu suatu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada peranan kemandirian daerah.

2. Rasio efektifitas anggaran

Dari hasil perhitungan tingkat efektifitas Daerah Kota Bukittinggi pada tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013 diatas, maka diperoleh data tingkat efektifitas secara keseluruhan pada tahun anggaran tersebut seperti terlihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Tingkat Efektifitas Anggaran Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp)	% Efektifitas	Efektifitas
2009	37.727.704.493,56	33.735.547.657,00	115,28%	Efektif
2010	33.847.174.752,21	42.193.150.511,00	80,22%	Tidak efektif
2011	42.223.418.002,00	45.023.938.692,00	93,80%	Tidak efektif
2012	45.076.555.841,00	49.310.208.409,00	91,41%	Tidak efektif
2013	55.203.591.605,00	54.646.355.950,00	101,02%	Efektif

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.2, tingkat efektifitas anggaran Kota Bukittinggi dari tahun 2009 -2013 rata – rata sebesar 96,35 %. . Keuangan Kota Bukittinggi tergolong efektif hanya pada tahun 2009 dan 2013 karena tingkat efektifitasnya diatas 100%, sedangkan pada tahun 2010, 2011, 2012 tidak mencapai target yang telah ditetapkan..

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kota Bukittinggi kurang mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan menjalankan tugas pemerintahannya

secara efektif dalam upaya merealisasikan anggaran pendapatan yang telah tersusun dalam rancangan APBD.

3. Rasio efesiensi anggaran

Dari hasil perhitungan tingkat efesiensi anggaran Daerah Kota Bukittinggi pada tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013 diatas, maka diperoleh data tingkat efesiensi anggaran secara keseluruhan pada tahun anggaran tersebut seperti terlihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3

**Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2009-2013**

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Biaya Guna Memungut PAD (Rp)	% Efisiensi	Efisiensi
2009	38.891.935.383,56	250.000.000,00	0,64%	Sangat Efisien
2010	33.847.174.752,21	288.450.000,00	0,85%	Sangat Efisien
2011	42.223.418.002,00	298.000.000,00	0,71%	Sangat Efisien
2012	45.076.555.841,00	298.017.500,00	0,66%	Sangat Efisien
2013	55.203.591.605,00	246.375.000,00	0,45%	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.3 mengenai tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 0,66% dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Tabel 4.3 juga menjelaskan bahwa tingkat efisiensi anggaran daerah Kota Bukittinggi dalam rangka merealisasikan anggaran pendapatan yang telah tersusun dalam rancangan APBD Kota Bukittinggi, mengalami perubahan setiap tahunnya dan mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kota Bukittinggi

mampu menjalankan tugas pemerintahannya secara sangat efisien dalam upaya menghasilkan PAD Kota Bukittinggi karena persentase tingkat efisiensi keuangan daerah <60%.

4. Rasio ketergantungan daerah

Dari hasil perhitungan tingkat ketergantungan Daerah Kota Bukittinggi pada tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013 diatas, maka diperoleh data tingkat ketergantungan secara keseluruhan pada tahun anggaran tersebut seperti terlihat pada tabel 4.4

**Tabel 4.4
Tingkat Ketergantungan Anggaran Daerah Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2009-2013**

Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	% ketergantungan	ketergantungan
2009	299.637.285.855,00	339.931.743.992,56	88,1%	Tinggi
2010	304.574.298.926,00	338.421.473.678,21	89,9%	Tinggi
2011	359.167.640.461,00	401.417.194.463,00	89,4%	Tinggi
2012	416.319.933.008,00	461.396.488.849,00	90,2%	Tinggi
2013	472.271.470.803,00	527.475.062.408,00	89,5%	Tinggi

Sumber : Data diolah

Tingkat ketergantungan tertinggi selama 5 tahun anggaran tersebut terjadi pada tahun 2012 yaitu dengan nilai rasio sebesar 90,2% dan tingkat ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu dengan nilai rasio sebesar 88,1%. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin buruk pemerintah daerah karena tidak mempunyai dana dari penghasilan daerah sendiri membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

Dapat diketahui bahwa tingkat ketergantungan anggaran berada antara 75% - 100%. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin buruk pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kota Bukittinggi masih

sangat tinggi dan belum mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena salah satu aspek terpenting pada pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus mempunyai sumber – sumber keuangan yang memadai atau cukup untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri agar tidak bergantung pada pihak eksternal.

5. Rasio pertumbuhan

Dari hasil perhitungan tingkat pertumbuhan PAD Kota Bukittinggi pada tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013 diatas, maka diperoleh data tingkat pertumbuhan PAD secara keseluruhan pada tahun anggaran tersebut seperti terlihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	% Pertumbuhan	Pertumbuhan PAD
2009	37.727.704.493,56	14,96%	Meningkat
2010	33.847.174.752,21	-12,97%	Menurun
2011	42.223.418.002,00	24,75%	Meningkat
2012	45.076.555.841,00	6,76%	Meningkat
2013	55.203.591.605,00	22,47%	Meningkat

Sumber : Data diolah

Dari tabel 4.5 di atas, terlihat bahwa pemerintah daerah Kota Bukittinggi tergolong mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena mampu menggali dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Kesimpulan Dan Saran **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pengujian terhadap tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah ditentukan dengan menggunakan analisis rasio-rasio keuangan.

Berdasarkan rasio kemandirian daerah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi masih tergolong sangat

kurang dalam tingkat kemandiriannya. Begitu juga dilihat dari kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Dari segi efektifitas anggaran, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tergolong tidak efektif dalam penetapan anggaran. Hal ini terlihat pada tabel 4.2 bahwa Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dominan belum mampu mencapai target PAD yang ditetapkan, dengan kata lain tidak mampu mencapai batas nilai minimum rasio efektivitas yaitu 100%.

Jika dilihat dari segi efisiensi anggaran, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah sangat efisien dalam mengeluarkan biaya untuk memungut PAD, karena berada pada kisaran <60%, dari segi pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, dalam tabel 4.10 terlihat bahwa Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tergolong mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai

Berdasarkan analisa data dan pembahasan yang telah peneliti uraikan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dilihat dari kelima rasio tersebut, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi belum mampu dalam pelaksanaan otonomi daerahnya. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi masih memiliki pola hubungan yang instruktif, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada peranan pemerintah daerah itu sendiri.

Saran

Salah satu komponen yang paling penting untuk digunakan

sebagai indikator guna mengukur kelima rasio yang peneliti gunakan adalah pendapatan asli daerah (PAD). Maka dari itu, pemerintah daerah Kota Bukittinggi dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi harus lebih efektif dalam melakukan pemungutan PAD. Bertolak dari penelitian di atas, pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan PAD harus semakin ditingkatkan karena PAD merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam pendapatan daerah. Jika PAD di daerah yang lain semakin meningkat, maka kemandirian daerah tersebut semakin meningkat sebab ketergantungan terhadap pihak eksternal semakin menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, indra. 2009. *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2000. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim Abdul dan Syam Kusufi Muhammad. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Nordiawan , Dedi, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Riwu Kaho Josef. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*.

- Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM. Yogyakarta
- Mardiasmo, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Marizka, Addina. 2009. *Analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota medan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara Medan
- Nasir dan Darlis. 2012. *Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Al Fino Losa*. Universitas Negeri Padang. Padang. Vol 1
- Suprpto, Tri. 2006. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Suprpto. 2008. *Hubungan pemerintah pusat dan daerah*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Ulum Rusydi. 2010. *Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Deteksi Ilusi Fiskal*. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Wahyuni. N, 2007. *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang*. *Jurnal Akuntansi*. Malang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

